



Analisis Polemik Anggaran Pengadaan Baju Dinas DPRD Kota Tangerang Tahun 2021

Priyanto Renaldo Sahala^{*a}, Piers Andreas Noak^a, Tedi Erviantono^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: renaldo5757@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the polemic that occurred regarding the budget for the procurement of official clothing for the Tangerang City Regional People's Representative Council (DPRD) in 2021. Procurement of official clothing is an important part of the budget of government institutions, and controversy sometimes arises regarding transparency, fairness and accountability in its management. . The analytical method used involves documentation studies, interviews, and content analysis from various sources including official reports and media news. The findings of this research identify various issues such as the auction process, product quality, costs, and public perceptions of transparency and accountability in budget use. The implications of this analysis provide a clearer picture of the aspects that need to be improved in the management of the Tangerang City DPRD official clothing procurement budget to increase efficiency, effectiveness and integrity in the use of public funds.

Keywords: Analysis, Polemic, Budget, Procurement, Official Clothes, DPRD, Tangerang City, Transparency, Accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik yang terjadi terkait anggaran pengadaan baju dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang pada tahun 2021. Pengadaan baju dinas merupakan bagian penting dari anggaran institusi pemerintahan, dan kontroversi terkadang muncul terkait transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Metode analisis yang digunakan melibatkan studi dokumentasi, wawancara, dan analisis konten dari berbagai sumber termasuk laporan resmi dan berita media. Temuan penelitian ini mengidentifikasi beragam isu seperti proses lelang, kualitas produk, biaya, serta persepsi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Implikasi dari analisis ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan anggaran pengadaan baju dinas DPRD Kota Tangerang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan integritas penggunaan dana publik.

Kata kunci: Analisis, Polemik, Anggaran, Pengadaan, Baju Dinas, DPRD, Kota Tangerang, transparansi, Akuntabilitas.

1. Pendahuluan

Merebaknya kasus Covid-19 jelas memberi dampak yang signifikan pada sektor ekonomi, terutama dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat pasca pandemi yang telah menyebabkan ekonomi Indonesia masuk dalam periode resesi (Mudrajad Kuncoro, 2021:9). Pada akhir Oktober 2020, Kemenkeu melaporkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) menurun hampir 15 persen, yakni sebesar 33,88 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dalam pendapatan daerah merupakan salah satu unsur yang membentuk APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD yang merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia selama pandemi Covid-19, warga negara Indonesia seharusnya lebih menumbuhkan jiwa sosial dan keprihatinan, Hal itu sudah selayaknya apabila dilakukan oleh para pejabat pemerintahan, di mana mereka sebagai wakil rakyat yang terpilih memperhatikan kepentingan rakyatnya. Akan tetapi tidak sedikit pejabat daerah yang justru mengalami krisis sosial, tidak berkeprimusiaan, yang justru menyalahgunakan dana APBD untuk kepentingan golongannya menganggarkan Baju Dinas yang fantastis nilainya. Kurangnya transparansi dan keterlibatan masyarakat saat menyusun RAPBD kepada rakyat justru menjadi celah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan APBD yang tidak sesuai peruntukannya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang kerap disingkat dengan DPRD ialah bagian dari wakil rakyat yang meneimpati daerah tingkat 1 dan 2 yaitu provinsi dan kotamadya. DPRD terdapat pada setiap provinsi dan

kabupaten/kota yang dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan kepala daerah bersamaan dengan gubernur, walikota, dan bupati masing-masing setiap daerah. sebagai salah satu Lembaga negara yang memiliki kedudukan tinggi DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi salah satunya yakni perihal anggaran. DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada periode berjalan. Tidak hanya sampai pada proses itu saja, DPRD melalui komisi terkait juga bertugas untuk melaksanakan pengoperasian APBD yang sudah disetujui. Fungsi Anggaran juga salah satu Fungsi yang dimiliki oleh DPRD yang meliputi pembahasan anggaran belanja dan juga pendapatan daerah. Hal ini dilaksanakan untuk membahas dan juga memberikan persetujuan terhadap rancangan yang sudah diajukan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah.

Peneelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana polemik yang terjadi terkait pengadaan baju dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang pada Tahun 2021. Peneelitian ini melihat relasi elite politik yang terjadi antara kepala daerah eksekutif, legislatif, dan pihak ketiga dalam perencanaan pengadaan baju dinas DPRD Kota Tangerang. Dengan menggunakan teori Public Policy Stream sebagai dasar peneelitian ini dalam menganalisis peristiwa yang terjadi sehingga menjadi polemik di masyarakat. Peneelitian ini juga akan menyajikan relasi yang terjadi antara pemerintah daerah (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif), dan pihak ketiga sebagai penyedia tender yang nantinya pengadaan baju dinas ini akan menjadi hak penuh tender dalam memproduksinya.

Anggaran adalah pedoman kerja dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang, serta merupakan komponen sentral akuntansi manajemen dalam sektor publik untuk kegiatan planning, coordinating, organizing dan controlling (Heinley 1992:56). Pengadaan baju dinas ini menimbulkan polemik di masyarakat dikarenakan bahan pakaian yang digunakan dalam proyek pengadaan baju dinas ini sudah setara kelas fashion mode internasional dengan menggunakan bahan baku dari brand Louis Vuitton. Seringkali menjadi sebuah pemandangan yang ironis mengapa sebuah proyek yang memiliki anggaran begitu besar hanya untuk hal yang tidak esensial dan substansial. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang mengatur tentang keuangan negara tertuang bahwa negara dan daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengelola tata keuangan negara secara efektif dan efisien. Masuk ke dalam pasal 18 ayat 3 menyebutkan bahwa Eksekutif dan legislatif di tingkat daerah harus dapat menentukan prioritas anggaran di tahun berjalan agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut Merchant (1981: 22) mengemukakan bahwa sistem penganggaran adalah suatu kombinasi dari information flows dengan proses dan prosedur administratif yang umumnya merupakan bagian integral dari perencanaan jangka pendek dan sistem pengendalian suatu organisasi. Dapat dikatakan bahwa asas keterbukaan informasi perihal akuntansi manajemen dalam bidang anggaran merupakan suatu dasar sebuah organisasi untuk dapat menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan, tidak boleh kurang dan juga tidak boleh berlebihan. Indonesia setelah melewati masa reformasi yang ditandai dengan meningkatnya keinginan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi kinerja public, pendekatan yang digunakan dalam hal proses anggaran menggunakan penganggaran kinerja (performance budgeting) yang merupakan konsep penganggaran dengan menjelaskan keterkaitan pengalokasian sumber daya yang dikeluarkan dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Sistematisasi proses penganggaran di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permenagri) Nomor 13 Tahun 2006 dimulai dari rencana kerja pada setiap satuan kerja, melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Dokumen RKA SKPD ini kemudian diteliti oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk dinilai keelayakannya (berdasarkan kebijakan umum serta plafon anggaran) untuk dijadikan dasar dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian akan disampaikan ke legislatif. Pada tahap inilah RAPBD akan ditentukan bersama oleh eksekutif dan legislatif tingkat daerah dengan hasil akhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mekanisme politik dalam penetapan APBD pada hakikatnya merupakan sarana dalam mencapai tujuan pembangunan dan rencana aksi nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Oleh sebab itu diperlukan pengambilan keputusan politik yang dapat mengikutsertakan peran masyarakat di dalamnya. Mulai dari tahap partisipasi masyarakat dalam merencanakan anggaran,

implemeintasi anggaran pada tahun berjalan, dan laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah harus serta dikawal oleh masyarakat. Permasalahan hingga saat ini ialah tendensi publik cenderung menyalahkan keputusan anggaran pada pemerintah kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Dilansir situs berita Kompas.com, anggaran bahan pakaian dinas anggota DPRD Kota Tangerang Tahun 2021 naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 anggaran untuk pengadaan baju dinas hanya Rp.312,5 Juta, sedangkan pada tahun 2021 anggarannya naik hampir dua kali lipat menjadi Rp.675 Juta. Sebelumnya, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) menyatakan bahwa ada empat merek bertaraf internasional yang akan digunakan anggota DPRD sebagai baju dinas. Salah satunya adalah brand dengan taraf internasional dengan merek dagang Louis Vuitton bakal menjadi bahan baku dari pakaian dinas ini dengan kuantitas 2 setel pakaian untuk setiap anggota dewan. Sementara itu untuk Pakaian Sipil Resmi (PSR) menggunakan bahan baku dari merek dagang Lanificio di Calvino, untuk Pakaian Sipil Harian (PSH) menggunakan bahan baku dari merek dagang Theiodorei, dan untuk Pakaian Sipil Lengkap (PSL) menggunakan bahan baku dari merek dagang Thomas Crown

Pembahasan awal mengenai asal usul pemilihan baju dinas ini dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang Bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Keisekretariat DPRD Kota Tangerang mengusulkan anggaran bahan pakaian tersebut. Dari hasil pembahasan tersebut, muncul anggaran bahan sebesar Rp 675 juta. Selain itu, muncul juga anggaran sebesar Rp 2,7 juta untuk menjahit satu setel pakaian DPRD. Dengan demikian, total anggaran ongkos menjahit pakaian untuk 50 anggota Dewan mencapai Rp 600 juta. Sekretariat DPRD (Sekwan) sempat menyampaikan anggaran sebesar total Rp 1,275 miliar untuk bahan dan ongkos menjahit itu ke DPRD Kota Tangerang.

Kota Tangerang sebagai daerah otonom dan sub-urban dari DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahannya juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat sebagai bentuk nyata kebijakan pemerintah dengan pelepasan tata pemerintahan (governance). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah lain maupun Pihak Ketiga yaitu Departemen/Lembaga Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, PT, CV, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum. Dengan adanya kewenangan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang, maka pemerintah daerah berhak saja untuk mengandalkan pihak ketiga dalam pengadaan baju dinas ini dikarenakan resource yang terbatas.

Kejasama dengan pihak swasta dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP) dalam rangka kerjasama pengadaan alat/infrastruktur bagi kepentingan publik ataupun golongan. Di Indonesia PPP dikenal sebagai Kejasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Keipala Lembaga/Keipala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Ada 3 alasan mengapa pemerintah menjalin Kejasama dengan CV sebagai pelepas Teindeir pengadaan baju dinas ini: (1) Alasan Politik: menciptakan pemerintah yang demokratis (egalitarian governance) serta untuk mendorong perwujudan good governance dan good society. (2) Alasan Administratif: adanya keterbatasan sumber daya pemerintah baik dalam hal SDM maupun kemampuan manajemen lainnya. (3) Alasan Ekonomi: agar dapat membandingkan harga terbaik dari beberapa teindeir yang bersaing, serta untuk meningkatkan ekonomi daerah (Widodo Tri, 2009: 55).

Pendekatan dalam politik anggaran tersebut menjadi analisis tajam bahwa persoalan anggaran harus letakkan pada kepentingan publik, analisa ekonomi dan analisa institusi, sehingga kebijakan anggaran dapat sesuai dengan aspek yang terkait yang dapat menghindarkan dari politik anggaran jangka pendek, ego kekuasaan dan penguasa saja, tetapi berbasis pada publik sebagai hak yang menerimanya. Dalam proses

penentuan anggaran realitas dan fakta di tingkat nasional maupun lokal menunjukkan terdapat tindakan peinggibiran rakyat atas haknya. Dimana rakyat menjadi korban dalam peineintuan anggaran. Kepeentingan elit dan kepeentingan-kepeentingan pihak-pihak tertentu secara otomatis masuk dalam peineintuan, peirumusan serta peingeisahan anggaran. Bahkan sudah menjadi keumuman politik transaksional untuk meningkatkan anggaran ataupun bantuan-bantuan lainnya melalui proses politik yang tidak sehat. Aspek kebutuhan pelayanan masyarakat semakin jauh dari target untuk memberikan pelayanan. Lebih-lebih keterlibatan partai politik penguasa yang mengarahkan birokrat juga semakin mempengaruhi suasana untuk mengambil kesempatan bagi kemajuan partainya di masa yang akan datang. Konflik kepentingan pun menjadi rahasia umum ketika pemerintah suatu proyek ternyata dimiliki oleh elite politik yang berada di lembaga itu sendiri.

Melihat dari penjelasan di atas perlu diadakannya rebudgeting atau realokasi anggaran untuk mengisi pos-pos anggaran yang lebih urgent. Rebudgeting adalah cara yang dilakukan pemerintah untuk merevisi dan memperbaiki peirapan anggaran sebagai kelanjutan dari proses anggaran tahunan, rebudgeting harus menjadi sarana dimana pemerintah dapat memenuhi tujuan yang bervariasi dan bahkan berlawanan dengan peanggaran, termasuk kontinuitas dan kontrol, perubahan dan akuntabilitas, dan fleksibilitas serta prediktabilitas (Wildavsky, 1988). Sebagai rencana keuangan, anggaran haruslah dinamis. Anggaran harus dapat menawarkan kemampuan untuk mengelola sesuatu yang tak terduga tanpa mengorbankan kontrol dan akuntabilitas yang terdapat dalam anggaran selama pra implementasi (Pitsvada, 1983). Sebuah pendapat (Rubin:1990) mengatakan bahwa Singkatnya, rebudgeting merupakan komponen integral dari serial anggaran yang mengacu pada proses anggaran awal dengan tujuan utama untuk melakukan pemulihan terhadap anggaran.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang dikaji dalam bentuk narasi ilmiah. Penelitian kualitatif ini mencakup upaya mengajukan pertanyaan, pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumen resmi terkait. Fokusnya adalah pada kualitas data dan proses penelitian daripada hasil akhir (Creswell 2013).

Sumber data dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer melibatkan wawancara dengan narasumber terkait topik penelitian, seperti Ketua DPRD, Kepala Bagian Anggaran, dan lainnya. Data sekunder mencakup data dari lembaga terkait, skripsi sebelumnya, artikel ilmiah, dan dokumen pemerintah terkait.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah eksekutif dan legislatif pemerintah Kota Tangerang dalam merumuskan kebijakan anggaran pengadaan baju dinas. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang relevan, observasi untuk mengamati pola perilaku atau kegiatan, dan dokumentasi sebagai bahan pendukung dari berbagai sumber yang relevan.

Instrumen penelitian melibatkan wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian secara sistematis. Observasi dilakukan untuk mengamati fenomena yang diteliti, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai alat bantu dalam pengumpulan data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian.

3. Pembahasan

Hasil Analisis

Indikator Aliran Masalah

Masalah yang timbul terkait polemik anggaran baju dinas di Kota Tangerang pada tahun 2021 menyoroti berbagai aspek yang meliputi sumber dana, proses penganggaran, dan persepsi masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik. Awal mula munculnya polemic ini ketika terjadi peningkatan sebanyak dua kali lipat yang signifikan dalam anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang. Anggaran baju dinas ini berasal dari APBD Kota Tangerang. Dalam hal ini, DPRD Kota Tangerang memang memiliki hak untuk menganggarkan baju dinas setiap tahun.

Peraturan mengenai anggaran baju dinas telah tercantum dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang “Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Dalam peraturan ini, DPRD memiliki hak untuk mengadakan barang dan jasa, tidak terkecuali dalam pengadaan baju dinas. Akan tetapi, pada tahun 2021 pengadaan baju dinas menjadi sorotan masyarakat karena anggaran yang meningkat di tengah masa transisi pandemi Covid – 19 menuju New Normal.

Persoalan muncul ketika pada tahun 2020, terjadi pemangkasan jumlah setelan baju dinas menjadi 4 setel pakaian dinas karena masa Covid-19 terjadi penurunan tingkat perekonomian di berbagai kalangan. Terjadi peningkatan anggaran pada tahun 2021 karena pengadaan baju dinas disesuaikan kembali menjadi 5 setel pakaian dan setiap anggota dewan wajib memiliki baju dinas tersebut. Anggaran pengadaan baju dinas yang telah disusun oleh DPRD Kota Tangerang telah diterima oleh Ketua POKJA DPRD Kota Tangerang. Pokja DPRD Kota Tangerang memiliki tugas untuk menjalankan pengadaan baju dinas tersebut.

Pengadaan baju dinas yang telah disusun ini, secara tidak sengaja diketahui publik ketika terdapat salah satu media massa “Inews Banten” yang mewawancarai ketua POKJA terkait pengadaan baju dinas. Dimana, salah satu bahan dari baju dinas tersebut ialah Louis Vuitton. Hal ini membuat DPRD Kota Tangerang mendapatkan atensi lebih dari masyarakat. Masyarakat merasa bahan dari baju dinas DPRD Kota Tangerang terlalu berlebihan, mengingat tahun 2021 merupakan masa peralihan pandemi Covid-19 menuju New Normal. Publik meragukan urgensi pengadaan baju dinas yang meningkat dua kali lipat, dimana salah satu alasan peningkatan ini ialah bahan dari baju dinas DPRD Kota Tangerang yang tidak sesuai dalam konteks perekonomian yang belum stabil .

Media Massa memiliki peran dalam memperbesar polemic ini. Terdapat dua sudut pandang yang berbeda dalam pengadaan anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang pada Tahun 2021. Pada sisi pemerintah, penggunaan bahan pakaian bertaraf internasional “Louis Vuitton” ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya jual beli masyarakat. Tender yang dipilih dalam pembuatan baju dinas ini ialah tender lokal. Dengan menggunakan tender lokal secara tidak langsung akan membuka peluang dalam menjalankan sistem perekonomian. Akan tetapi, masyarakat tidak menerima alasan tersebut karena masyarakat melihat sebagai pemborosan anggaran. Hal inilah yang membuat terjadi ketegangan antara masyarakat.

Secara keseluruhan, analisis indikator aliran masalah ini menunjukkan bahwa masalah polemik anggaran baju dinas Kota Tangerang pada tahun 2021 tidak hanya terbatas pada anggaran itu sendiri, tetapi juga melibatkan transparansi, efisiensi, dan legitimasi penggunaan dana publik. Diperlukan komunikasi yang lebih terbuka dan pembenaran yang jelas dari pihak berwenang untuk meredakan ketegangan dan memperbaiki persepsi masyarakat tentang pengelolaan anggaran publik. Untuk meredakan ketegangan yang terjadi, DPRD Kota Tangerang mengadakan rapat untuk membahas terkait anggaran baju dinas pada tahun 2021. Rapat tersebut mengkaji kembali anggaran yang telah disusun sebelumnya menjadi anggaran baru yang nominal biayanya dapat dipertanggungjawabkan ke hadapan publik.

Analisis Kebijakan

Dalam menghadapi polemik anggaran baju dinas di Kota Tangerang pada tahun 2021, berbagai alternatif kebijakan diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat, baik dari DPRD Kota Tangerang maupun dari masyarakat

itu sendiri. Ketika berita tentang polemik tersebut mencuat, DPRD Kota Tangerang menjadi perbincangan utama di kalangan masyarakat. Hal ini memicu tindakan dari para pejabat untuk menangani masalah tersebut. Bapak Taufik Romdhoni S.H, salah satu pejabat, menyampaikan bahwa DPRD langsung mengadakan rapat untuk membahas anggaran baju dinas. Mereka juga mendengarkan masukan dari masyarakat, yang menjadi dasar bagi beberapa rekomendasi kebijakan yang diusulkan.

Dalam rapat tersebut terdapat rekomendasi – rekomendasi untuk meminimalisir anggaran baju dinas. Hal ini terungkap saat wawancara dengan Bapak Wahyu Triatmojo, yang menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi biaya produksi, terutama dalam hal ongkos jahit. Rekomendasi ini mencerminkan respons DPRD terhadap kekhawatiran masyarakat tentang penggunaan anggaran yang efisien dan transparan. Setelah rapat, DPRD Kota Tangerang memutuskan untuk membatalkan anggaran baju dinas sebelumnya dan mengalokasikan anggaran yang lebih rendah. Keputusan ini diambil karena DPRD merasa tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Anggaran baju dinas sudah termasuk dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Meskipun pengadaan baju dinas tidak melanggar aturan, DPRD merasa perlu merespons kekhawatiran masyarakat tentang ukuran anggaran yang terlalu besar, terutama di tengah pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD berusaha memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Reaksi ini juga mencerminkan fokus DPRD pada kebutuhan masyarakat dalam kondisi kesehatan yang sulit, dengan mengalihkan sebagian besar anggaran yang semula dialokasikan untuk pembangunan gedung ke sektor kesehatan. Ini menunjukkan bahwa DPRD berupaya untuk menyesuaikan prioritas dan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan yang diambil oleh DPRD Kota Tangerang dalam menangani polemik anggaran baju dinas menggambarkan respons yang cermat terhadap masukan masyarakat. Meskipun kebijakan tersebut tidak melanggar aturan yang ada, DPRD memilih untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam mengalokasikan anggaran, menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi, efisiensi, dan responsivitas terhadap kepentingan publik.

Kebijakan yang diambil oleh DPRD Kota Tangerang dalam menangani polemik anggaran baju dinas mencerminkan respons yang cermat terhadap masukan masyarakat. Meskipun kebijakan tersebut tidak melanggar aturan yang ada, DPRD memilih untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam mengalokasikan anggaran, menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi, efisiensi, dan responsivitas terhadap kepentingan publik. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen DPRD untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab serta sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Analisis Politik

Analisis ini mengungkap peran politik yang signifikan dalam polemik terkait anggaran baju dinas di Kota Tangerang pada tahun 2021. Terdapat keterlibatan yang erat antara pemangku kebijakan, masyarakat, dan media massa dalam masalah ini. Pers atau media massa sebagai salah satu elemen penting dalam politik, memainkan peran yang vital dalam proses ini. Dalam konsep "Political Stream", pers tidak hanya menjadi pengawas kebijakan tetapi juga penggerak opini publik terhadap kebijakan pemerintah. Dr. rer. Pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.P.P, dari Universitas Gadjah Mada, menggarisbawahi peran pers dalam membentuk dan mempengaruhi kebijakan publik. Pers memainkan peran penting dalam "policy formulation" dengan menyampaikan ide dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk bertindak. Namun, ketika sebuah kebijakan dianggap tidak tepat atau tidak efektif, pers juga dapat mempengaruhi "policy implementation" dengan mengkritisi dan memicu perubahan.

Dalam kasus anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang, reaksi media massa terhadap anggaran yang meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya memainkan peran kunci dalam memunculkan perdebatan publik. Media massa membantu menggambarkan anggaran tersebut sebagai kontroversial dan tidak sesuai dengan keadaan ekonomi saat itu, yang kemudian menghasilkan tekanan dari masyarakat untuk mempertanyakan keputusan DPRD. Dalam konteks ini, keputusan DPRD Kota Tangerang untuk mengadakan rapat dan mengkaji ulang anggaran baju dinas dapat dianggap sebagai respons terhadap tekanan dan kritik yang diterima dari media massa serta masyarakat.

Pandangan dari Ibu Anastasia Patricia Novlina Nurak, S.IP, M.IP, dari Universitas Warmadewa, menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Beliau mengkritik kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran baju dinas. Beliau juga menyarankan agar rapat-rapat tersebut melibatkan perwakilan masyarakat dan media sejak awal. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki rasa kepercayaan kepada pemerintah. Saat kasus ini mencuat, DPRD Kota Tangeng menjadi sorotan masyarakat. Tekanan yang diberikan oleh masyarakat juga membuat DPRD Kota Tangerang harus membuat keputusan yang dapat menjawab kritikan serta pertanyaan terkait anggaran baju dinas. Tanggapan DPRD Kota Tangerang untuk melakukan rapat, menunjukkan respons yang cepat dan tanggap terhadap opini publik.

Rapat yang diadakan segera setelah polemik muncul menunjukkan keseriusan DPRD dalam menangani masalah ini. Keterlibatan fraksi-fraksi dalam rapat dan pembahasan terbuka tentang pengeluaran anggaran baju dinas menggambarkan komitmen DPRD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Jika dilihat dari proses pengambilan keputusan saat rapat pengadaan anggaran sebelumnya, DPRD Kota Tangerang tidak menyalahi aturan. Pada saat rapat berlangsung, diketahui 5 fraksi telah setuju dan 4 fraksi menolak pengadaan anggaran baju dinas tahun 2021. Akan tetapi dengan mencuatnya anggaran ini kepada masyarakat, 4 fraksi yang menolak anggaran tersebut seperti mendapat dukungan lebih untuk mengajukan kajian ulang terkait anggaran baju dinas tersebut.

Keputusan untuk membatalkan anggaran sebelumnya dan mengalokasikan anggaran yang lebih rendah merupakan langkah yang diambil oleh DPRD sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD mempertimbangkan opini publik dan berusaha memperbaiki kebijakan mereka untuk lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat. Peran media massa tidak hanya mempengaruhi opini masyarakat, tetapi juga mempengaruhi tindakan dan keputusan DPRD. Ketika media mengangkat isu anggaran baju dinas, masyarakat bereaksi dengan desakan dan kritik yang kemudian membuat DPRD merespons dengan mengadakan rapat dan mendengarkan masukan dari masyarakat serta fraksi-fraksi yang terlibat.

Rekomendasi yang dihasilkan dari rapat tersebut, seperti merevisi anggaran dan melaksanakan lelang untuk membuat proses tender lebih adil, menunjukkan upaya DPRD untuk memperbaiki proses penganggaran dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Dengan demikian, analisis tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran media massa dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Terdapat keterkaitan yang erat antara politik, media massa, dan masyarakat dalam proses pembentukan dan implementasi kebijakan, yang menuntut kerja sama dan dialog antara semua pihak terkait untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan lebih transparan

Terbukanya Jendela Kebijakan (Policy Window)

Ketiga aliran yaitu aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik bertemu karena adanya suatu peluang yang dinamakan jendela kebijakan (Policy Window). Peluang yang menjadi agenda kebijakan dalam penyelesaian polemik anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang. DPRD Kota Tangerang memiliki hak dalam pengadaan barang dan jasa, hak tersebut telah tercantum dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021. Dalam pengadaan baju dinas, terjadi miss communication antara DPRD Kota Tangerang, Media Massa, dan masyarakat. Anggaran baju dinas yang meningkat dua kali lipat memiliki dampak terhadap masyarakat. Masyarakat merasa anggaran tersebut terlalu berlebihan dan bukan urgensi yang harus dijalankan mengingat masa peralihan Covid-19.

Pertemuan tiga aliran (coupling juncture) dengan keterlibatan policy entrepreneur yaitu media massa dalam penyebaran informasi terkait pengadaan baju dinas DPRD Kota Tangerang dalam proses agenda kebijakan penyelesaian polemik anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang yaitu aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik membahas persoalan yang terjadi akibat transparansi, alternatif – alternatif kebijakn yang digunakan untuk mengatasi masalah, situasi politik dan opini publik yang berkembang saat terjadi polemik anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang tahun 2021.

Peran Policy Entrepreneur

Berkaitan dengan banyaknya kepentingan dalam penyusunan anggaran baju dinas oleh DPRD Kota Tangerang, baik berasal dari entrepreneur maupun masyarakat. DPRD Kota Tangerang berupaya untuk menyelesaikan polemic anggaran baju dinas dengan memunculkan rekomendasi – rekomendasi yang dapat diterima oleh public. Hal ini disebabkan karena DPRD Kota Tangerang tidak melanggar peraturan yang ada, Akan tetapi dalam masa peralihan, hal tersebut dirasa bukan suatu urgensi yang harus dipenuhi mengingat anggaran yang dibuat mengalami peningkatan.

Dalam proses agenda setting penyelesaian polemic anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang terdapat pihak – pihak yang dinamakan policy entrepreneur (pihak yang mempertemukan) yang mampu mempertemukan ketiga aliran masalah public dapat dijadikan agenda.

1. Media Massa (INews Banten)

Keterlibatan media massa dalam polemic anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang. Secara teknis, media massa mempublikasikan terkait anggaran dan bahan dari baju dinas yang ditetapkan oleh DPRD Kota Tangerang pada tahun 2021. media massa telah memainkan peran krusial dalam membuka tabir transparansi dalam pengeluaran dana publik. Publikasi ini tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh tentang jumlah dana yang dialokasikan untuk baju dinas, tetapi juga menghadirkan analisis mendalam tentang pemilihan bahan dan pertimbangan harga yang dibuat oleh DPRD. Respons yang ditimbulkan dari publikasi tersebut mendorong DPRD Kota Tangerang untuk melakukan kajian ulang terhadap alokasi anggaran yang telah mereka tentukan untuk baju dinas di tahun 2021. Langkah ini tidak hanya mencerminkan pentingnya responsibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, tetapi juga menggambarkan betapa kuatnya pengaruh media massa dalam membentuk opini publik dan mendorong tindakan yang bertanggung jawab dari pihak berwenang. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi transparansi anggaran yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Tangerang, media massa telah berfungsi sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa kepentingan publik diutamakan dan bahwa proses pengelolaan dana publik dilakukan dengan integritas yang tinggi.

2. DPRD Kota Tangerang

Keterlibatan DPRD Kota Tangerang memiliki peran penting dalam kasus polemic anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang pada tahun 2021. DPRD Kota Tangerang melakukan kajian terhadap meningkatnya pengadaan anggaran baju dinas tahun 2021 serta rekomendasi – rekomendasi yang diajukan untuk meminimalisir opini publik yang menyorot DPRD Kota Tangerang. DPRD Kota Tangerang mengadakan kembali rapat paripurna untuk membahas anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang tahun 2022. Sehingga akhirnya muncul rekomendasi untuk menengahi permasalahan polemic anggaran baju dinas di tahun 2021 dengan melakukan transparansi kepada masyarakat Kota Tangerang. Rekomendasi yang disahkan oleh DPRD Kota Tangerang dengan tetap membuat baju dinas, akan tetapi anggaran yang dikeluarkan dianggarkan dengan nominal yang lebih rendah. Kepentingan pemerintah secara umum dengan adanya hasil rekomendasi mampu menguntungkan semua pihak. Dalam hal ini, DPRD Kota Tangerang tetap membuat baju dinas dan masyarakat mengetahui transparansi pengadaan anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang tahun 2021.

3. Masyarakat Kota Tangerang

Peran keterlibatan masyarakat Kota Tangerang dalam polemic anggaran baju dinas ialah sebagai *advicer* dalam kebijakan maupun peraturan yang dibuat oleh DPRD Kota Tangerang. Keterlibatan masyarakat juga memiliki peran untuk mendukung suatu kebijakan yang telah dibuat. Dimana diketahui masyarakat Kota Tangerang mengetahui kondisi perekonomian pada tahun 2021 yang belum stabil mengingat masa *New Normal*, akan tetapi DPRD Kota Tangerang melakukan pengadaan anggaran baju dinas yang mencapai Rp. 675.000.000. Masyarakat merasa anggaran sebesar itu ada baiknya digunakan untuk membantu masyarakat yang masing terdampak Covid-19.

4. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penyusunan agenda kebijakan penyelesaian polemik anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang tahun 2021 terdapat sejumlah persoalan. Persoalan utamanya adalah peningkatan anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang yang meningkat dari Rp. 325.000.000 menjadi Rp. 625.000.000. Dengan anggaran sebanyak ini, masyarakat menilai bahwa anggaran yang dibuat oleh DPRD Kota Tangerang terlalu berlebihan mengingat perekonomian di Indonesia belum stabil karena pandemi Covid-19. Didukung adanya keterlibatan media massa yang menjadi unsur penyeimbang terkait berita – berita yang disajikan terkait pengadaan tersebut. Sebagaimana telah dilakukan penelitian, penulis menemukan beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Proses penyusunan agenda (*agenda setting*) kebijakan penyelesaian polemik anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang, melalui hasil penelusuran ketiga aliran yaitu aliran masalah (*problem stream*), aliran kebijakan (*policy stream*), dan aliran politik (*political stream*). Dimana, ketiga aliran tersebut digunakan dalam penyelesaian polemik anggaran yang terjadi di masyarakat. Dalam proses penyelesaian kebijakan pengadaan anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang, aliran politik (*political stream*), opini publik serta adanya *agenda setting* ialah aspek yang paling dominan dalam penyelesaian polemik anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang Tahun 2021.
2. Dalam proses penyusunan agenda (*agenda setting*) kebijakan penyelesaian polemik anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang ditemukannya kepentingan pribadi di antara fraksi, sehingga dalam pembahasannya menimbulkan perbedaan argument yang akhirnya memunculkan sebuah rekomendasi yaitu pembatalan anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang Tahun 2021 serta mengkaji ulang kembali pengadaan anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang Tahun 2021.

Saran

Pembuatan baju dinas bagi anggota DPRD Kota Tangerang merupakan bagian penting dari anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya. Namun, perlu dipertimbangkan kembali apakah anggaran yang digunakan untuk pembuatan baju dinas ini sudah efisien atau tidak. DPRD Kota Tangerang perlu melakukan kajian ulang terhadap anggaran yang dialokasikan untuk pembuatan baju dinas tersebut. Kajian ini perlu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk anggota DPRD sendiri, untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dari anggaran publik benar-benar memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat Kota Tangerang.

DPRD Kota Tangerang harus meningkatkan transparansi terkait penggunaan anggaran dan proses tender dalam pembuatan baju dinas. Transparansi yang jelas akan memungkinkan masyarakat untuk memahami dengan lebih baik bagaimana anggaran publik digunakan dan apakah penggunaannya telah sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Informasi yang terbuka dan mudah diakses tentang proses tender juga akan membantu memastikan bahwa pilihan vendor atau pihak yang memenangkan tender didasarkan pada kriteria yang adil dan transparan.

DPRD Kota Tangerang juga dapat mempertimbangkan alternatif lain dalam pengadaan baju dinas yang lebih hemat anggaran namun tetap berkualitas. Misalnya, mempertimbangkan opsi penggunaan bahan lokal atau bekerja sama dengan produsen lokal yang mungkin dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Langkah-langkah seperti ini tidak hanya dapat menghemat anggaran, tetapi juga mendukung perekonomian lokal. Dengan demikian, memperhatikan kembali anggaran dan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan baju dinas DPRD Kota Tangerang adalah langkah penting untuk memastikan penggunaan anggaran publik yang efisien dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- A., Morissan M. dkk. 2017. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana.
- Accounting, Organizations and Society, Volume 10, Issue 2, Pages 20-22.* [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(85\)90016-9](https://doi.org/10.1016/0361-3682(85)90016-9).
- Agnes, A. A. (2020). *Analisis Peran Aktor dalam Penetapan Agenda Kebijakan Pembangunan Taman Kota di Surabaya* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Amin, F. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Angin, R., & Manggala, A. S. (2022). *Monograf: Mengapa Agenda Kebijakan Pemerintah Diabaikan (Studi Konflik PT Imasco Asiatic dengan Petani di Kabupaten Jember)*. Pustaka Abadi.
- Cornia, G. C., Nelson, R. D., & Wilko, A. (2004). Fiscal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores. *Public Administration Review*, 64(2), 164–179. <http://www.jstor.org/stable/3542610>
- Creswell W. John. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson.
- Forrester, J. P., & Mullins, D. R. (1992). Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. *Public Administration Review*, 52(5), 467–473. <https://doi.org/10.2307/976806>
- Goodin, R. E., & Nurainun Mangunsong, S. H. (2021). *Sistem Pemerintahan dan Politik Penghematan: Handbook Kebijakan Publik*. Nusamedia.
- Gusman, E. (2020). LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH DALAM NEGARA DEMOKRASI. *Ensiklopedia Social Review*, 2(2), 102-110.
- Kementerian Keuangan. (2020, Oktober 15) <https://kemenkeu.go.id>
- Letor, R. P. (2021). POLICY ENTREPRENEURS DAN JARINGAN KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI ERA DESENTRALISASI. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(1), 1-20.
- Merchant, A, Kenneth. (1981). *budgeting and the propensity to create budgetary slack*,
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. 1994. An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications.
- Mintrom, M., & Norman, P. (2009). Policy entrepreneurship and policy change. *Policy studies journal*, 37(4), 649-667.
- Mudrajad Kuncoro; Wibi Hardani. (2013). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi bagaimana meneliti dan menulis tesis?*/ Mudrajad Kuncoro; editor : Wibi Hardani. Jakarta:: Erlangga,.
- Nindita, H. (2021, Agustus 10). *kompas.com*. Retrieved from kompasTV: <https://www.kompas.tv/article/200285/polemik-pakaian-dinas-dprd-kota-tangerang-anggaran-naik-dua-kali-lipat-hingga-baju-louis-vuitton>
- Novatiani, R. A., & Lestari, N. (2014, May). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di DPRD Kota Bandung. Seminar Nasional, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Perbandingan, Praktik, dan Ideal*. Elex Media Komputindo.
- Pambayun, E. L. (2021). *Dialektika Dosen Indonesia Dalam Menyikapi Covid-19: Kajian Komunikasi, Psikologi, Pendidikan, Agama/Dakwah, Dan Linguistik*. Penerbit Adab.
- Pemerintah Kota Tangerang. (2021, Agustus 4) <https://lpse.tangerangkota.go.id>.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Sistematika Penganggaran dan Struktur APBD
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Sistematika Proses penganggaran
- Rahmad Daulay, S. T. (2021). *Pergolakan Pemikiran Reformasi Birokrasi*. Deepublish.
- Register, L. M., & Henley, T. B. (1992). The Phenomenology of Intimacy. *Journal of Social and Personal Relationships*, 9(4), 467–481. <https://doi.org/10.1177/0265407592094001>
- Renick, M. J. (1981). *Examining the self-perceptions of learning-disabled children and adolescents: Issues of measurement and a model of global self-worth*. University of Denver.
- Searching for Safety, Aaron Wildavsky. 1988. Transaction Books. 252 pages. ISBN: 0-912051-18-3 (P); 0-912051-17-5 (C). \$NA. (1990). *Bulletin of Science, Technology & Society*, 10(4), 244–244. <https://doi.org/10.1177/027046769001000432>
- Subarsono, A. G. (2005). Public policy analysis. *Yogyakarta: Student Library*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 18 Ayat 3 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 (MPR,DPR,DPRD,DPD)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Widiastuti, N., Melavenic, S. D., & Rahman, S. (2022). SIKAP MUHAMMADIYAH ATAS KEBIJAKAN NIPPONISASI PADA ERA KEPENDUDUKAN JEPANG DI HINDIA BELANDA: TINJAUAN NORMATIF KINGDON. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(9), 1083-1094.
- Widodo, T. (2006). Perencanaan Pembangunan Era Otonomi Daerah. *UPP STIM YKPN. Yogyakarta*.